

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena pencemaran lingkungan dalam kajian hubungan internasional berawal terbentuknya masyarakat internasional dipandang dari segi kehidupan sosial yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia di negara lain. Pencemaran lingkungan terhadap air danau, sungai, maupun lautan akibat meningkatnya jumlah masyarakat dunia untuk memenuhi kebutuhan penggunaan air yang seakan tak pernah cukup untuk terus menerus dieksploitasi dari aktivitas pembangunan industri dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Salah satunya adalah Tiongkok yang menjadi sorotan dunia karena berhasil membangun perekonomiannya dengan pesat. Melalui revolusi industri masif, Tiongkok yang mulanya masyarakat agrarian terbelakang bertransformasi menjadi sebuah gardu industri dunia (Wen, 2016). Tiongkok saat ini menghadapi permasalahan terkait lingkungan hidup akibat pembangunan industri yang dilakukan hampir dalam waktu 30 tahun terakhir. Saat ini, Tiongkok menjadi pusat perindustrian tekstil merek-merek ternama dunia seperti H&M, ZARA, Uniqlo, MANGO dan merek lainnya. Dengan banyaknya industri tekstil maka akan banyak pula limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut.

Limbah yang di hasilkan oleh perindustrian tersebut menyebabkan rusaknya lingkungan terutama lingkungan air yang berada disekitar area perindustrian tersebut. Kerusakan lingkungan adalah salah satu problematika yang dihadapi oleh warga Tiongkok setempat. Penanggulangan kerusakan lingkungan adalah visi dan misi suatu organisasi internasional yang bernama *Greenpeace* yang bergerak dalam isu-isu yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan.

Greenpeace adalah organisasi non pemerintah yang termasuk kedalam organisasi lingkungan internasional yang didirikan di Vancouver, British Columbia, Kanada pada 1971. *Greenpeace* dikenal menggunakan aksi langsung bersama dengan konfrontasi damai dalam melakukan kampanye untuk menyuarakan aspirasinya dalam melindungi lingkungan dari kerusakan. *Greenpeace* sendiri mengatakan bahwa anggotanya memiliki tujuan untuk membantu penyelidikan, mengekspos, dan menghadapi penyalahgunaan lingkungan oleh pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia. Anggotanya memastikan keamanan lingkungan yang masyarakat butuhkan seperti memperjuangkan solusi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan mempromosikan kesetaraan sosial global, termasuk inovasi ilmiah dan teknologi.

Sebelum masuknya *Greenpeace* ke Tiongkok pada awal tahun 1970an, konsepsi polusi dimaknai sebagai konsepsi asing. Masalah dan tantangan lingkungan yang dihadapi Tiongkok dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang kuat. Demikian pula, berdasarkan studi kasus terkait pencemaran kronis di sungai

Huai yang disebabkan oleh ribuan perusahaan kecil, terutama di sektor manufaktur kertas (Economy, 2007, p. 1).

Menurut Elizabeth C. Economy menyatakan bahwa perusakan lingkungan di Tiongkok berdasarkan budaya tradisional Tionghoa yang kurang menghargai alam, serta sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam yang merugikan lingkungan. Oleh karenanya, polusi tidak mendapatkan cukup tempat dalam legislasi dan tidak begitu dihiraukan oleh jajaran birokrasi Tiongkok pada masa itu. Namun, Elizabeth C. Economy dan Kristen A. Day sepakat dengan menyoroti faktor ekonomi, kelembagaan dan politik sebagai penyebab utama meningkatnya kecepatan kerusakan lingkungan di Tiongkok. Dalam bukunya Elizabeth Economy, menyatakan bahwa penilaian biaya ekonomi dan kesehatan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang diperkirakan mencapai 8% -12% dari PDB setiap tahunnya (Economy, 2007).

Seiring berjalannya waktu Tiongkok mulai ada kenaikan dalam masa pembangunan di negaranya.. Akan tetapi, pemerintah Tiongkok telah mendesain pembangunan lingkungan sejak tahun 1970 yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu; pada tahap *pertama*, adalah ketika pemahaman akan kesadaran lingkungan adalah target utama. Berawal ketika Tiongkok menghadiri Konferensi Stockholm tahun 1972 di Swedia. Setelah konferensi Stockholm dilaksanakan Tiongkok diminta oleh badan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) sebagai tuan rumah Konferensi Perlindungan Lingkungan I pada tahun 1973 yang diadakan di Beijing. Hasil dari konferensi ini adalah tumbuhnya kesadaran bahwa ada permasalahan lingkungan di

Tiongkok dan perhatian atas lingkungan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan ekonomi. Hal ini lantas menghasilkan kebijakan *San Tong Shi* yang artinya tiga hal yang secara bersamaan yaitu proyek perlindungan lingkungan harus mengintegrasikan antara desain, pemasangan dan pengoperasian (Vermeer, 1998, pp. 952-985).

Pada tahun 1979, Komite Kongres Nasional Tiongkok menyetujui rancangan statuta perlindungan lingkungan yang meregulasi peninjauan dampak proyek baru pada lingkungan serta menerapkan denda pada industri yang tidak memenuhi standar pemerintah. Tetapi dalam praktiknya, kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena ketiadaan struktur legal yang mengikat, keterbatasan dana, sumber daya manusia, serta struktur organisasi dalam mengimplementasi kebijakannya (Vermeer, 1998).

Tahap kedua terjadi antara 1983 sampai 1989. Pada tahap ini, pemerintah Tiongkok berfokus pada perihal pembersihan dan pencegahannya saja. Komisi Nasional Lingkungan Di tahun 1983, Tiongkok mengadakan Konferensi Nasional Perlindungan Lingkungan yang menghasilkan pengertian manajemen lingkungan dan penanggulangan polusi dibedakan; peran dan tanggung jawab biro perlindungan lingkungan dan organisasi serta korporasi dalam perlindungan lingkungan juga dibedakan. Tahun 1984, Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan dibentuk dibawah Kongres Nasional Tiongkok. Komnas Lingkungan ini berfungsi untuk mengkoordinasikan semua agensi yang aktifitasnya berdampak terhadap lingkungan (Vermeer, 1998).

Terakhir, tahapan ketiga adalah tahap *refining the institutional framework* yang dimulai pada 1989 hingga saat ini. Tahap ketiga mengacu pada hasil Konferensi Nasional Perlindungan Lingkungan 1989 yang menekankan strategi seperti penyusunan skala prioritas dalam penanganan polusi, pengontrolan polusi pada perusahaan, penyusunan tujuan perlindungan lingkungan dalam berbagai tingkat, hingga pembentukan sistem pembatasan polusi (Hennida, 2014, pp. 289-304). Bisa dikatakan bahwa perhatian pemerintah Tiongkok terhadap permasalahan lingkungan semakin besar (Vermeer, 1998).

Namun di tahun 1990an, Tiongkok mengalami permasalahan lingkungan yang pelik. Polusi menyebar mulai dari kota sampai desa, ekosistem secara bertahap menurun kualitasnya. Tahun 1996 hingga 1999, pemerintah Tiongkok mengadakan Konferensi Nasional Perlindungan Lingkungan keempat di Beijing. Pemerintah menerapkan ukuran-ukuran yang lebih ketat mengingat masalah lingkungan terkait dengan permasalahan keberlangsungan negara dan pembangunan negara. Ukuran-ukuran yang dipakai adalah memperkuat instrumen pemaksa pada hukum perlindungan lingkungan yang sudah ada, mempertajam *monitoring*, mengintegrasikan isu-isu lingkungan pada level pengambil keputusan di tingkat makro, peningkatan penggunaan teknologi, meningkatkan pendanaan perlindungan lingkungan, dan mengadakan lebih banyak pendidikan lingkungan terhadap warganya (Vermeer, 1998).

Tahun 1999, strategi perlibatan negara Tiongkok memiliki tiga kebijakan dalam perlindungan lingkungan yaitu; Kebijakan pertama adalah *The*

Environmental Protection Target Responsibility System (EPTRS). EPTRS mengatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah (gubernur dan walikota) untuk bertanggung jawab terhadap kualitas lingkungan di wilayah masing-masing dalam periode kepemimpinannya. Kebijakan kedua adalah *the Evaluation System for Comprehensive City Environmental Control* (ESCCEC). ESCCEC mengatur dua puluh indikator lingkungan yang selanjutnya dievaluasi dan diberikan penilaian oleh agen nasional perlindungan lingkungan. Disediakan insentif dan *reward* tertentu untuk kota-kota dengan program lingkungan terbaik. Kebijakan ketiga adalah melakukan zonanisasi terhadap *township enterprises* berdasar polutan yang dihasilkan. Dengan begitu limbah yang dibuang mudah untuk diolah dan diawasi (Zhang, Liu, & Bigsten, 1999, pp. 465-484).

Pada tahun 2000 hingga 2006 kerusakan lingkungan di Tiongkok terus – menerus berkembang yang mengakibatkan kualitas air di Tiongkok semakin berkurang. Berdasarkan data dari *World Resources Institute*, terdapat permasalahan pencemaran lingkungan ada tujuh sungai besar di Tiongkok yang disebabkan oleh limbah industri tekstil, limbah mentah, dan limpasan pertanian dan lokasi pencemaran ini tepatnya berada di wilayah administrasi Huai, Hai, Liao, Songhua, Chang (Yangtze), Zhu (Pearl), dan Huang (Yellow) tingkat polusinya tinggi dan 80% sudah tidak terdapat ikan serta wilayah lainnya Guangdong, Guangxi, Yunnan, Sichuan, Guizhoi, Hunan, Jiangxi, Fujian, Hainan, Hong Kong dan Makau atau yang disebut sebagai perairan Sungai Pearl, Sungai Yangtze, dan Sungai Kuning dinyatakan sudah tidak sesuai untuk digunakan sebagai bahan baku air minum dan

irigasi. Pada daerah ini pencemaran lingkungan yang terjadi mencapai angka hingga 80% untuk air pantai Tiongkok dan 70% untuk sungai dan danau Tiongkok (Cann, Chan, & Shangquan, 2005). Di tahun ini juga, pemerintah Tiongkok tidak melakukan tindakan apapun yang signifikan untuk membantu warganya yang terdampak oleh limbah industri tekstil.

Pada tahun 2006 didirikannya *Institute of Public & Environmental Affairs* (IPE) meluncurkan versi 3.0 dari aplikasi seluler *Blue Map*-nya. Di antara fungsi IPE lainnya, yaitu memberikan penyajian terhadap diagram aplikasi yang mencemari pabrik di Tiongkok menggunakan data emisi waktu nyata, serta menawarkan implikasi praktis yang menjanjikan untuk manajemen rantai pasokan tekstil merek ternama. Manufaktur tekstil - terutama pewarnaan dan *finishing* kain - menggunakan dan membuang air dalam jumlah besar. Ini terutama benar di Tiongkok, di mana banyak pabrik beroperasi jauh dari efisiensi optimal: pada kenyataannya, pewarnaan dan *finishing* tekstil adalah sumber pembuangan air limbah industri terbesar ketiga di Tiongkok. Jika air limbah ini tidak diolah dengan benar, hal itu berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat Tiongkok (Logan, 2016).

Hampir sepertiga dari air permukaan Tiongkok berada pada level IV atau lebih buruk, karena dianggap tidak layak untuk kontak manusia. Kualitas air lingkungan di Tiongkok untuk manufaktur tekstil, seperti cekungan Taihu, Teluk Hangzhou, dan Delta Sungai Mutiara, yang sangat suram (Logan, 2016).

Di tahun ini juga pemerintah Tiongkok mengimplementasikan “*the new renewable energy law*” untuk merubah struktur *supply* energi dan usaha perlindungan lingkungan. Ditahun yang sama, pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan rencana pembangunan lima tahun (2006-2011) yang mencakup bahasan mengenai efisiensi energi dan usaha percepatan perlindungan lingkungan dengan target pada pengurangan konsumsi energi per unit GDP dan pengurangan polusi dari 20% menjadi 10% (National People Congress (NPC), 2006). Hal ini menunjukkan bahwa belum terlihatnya keberhasilan yang direncanakan oleh pemerintahan Tiongkok terhadap perlindungan lingkungan yang pemerintah Tiongkok agendakan dalam kurun waktu lima tahun tersebut.

Pada tahun 2007 *Greenpeace* sudah mengawasi daerah Tiongkok yang tercemar oleh air limbah industri melalui satelit dan mengeklaim peningkatan pencemaran yang angkanya mencapai naik 2 kali lipat dan pencemaran tersebut terjadi karena banyaknya pembukaan perusahaan industri jeans di Tiongkok (Health, 2011). Kemudian, pada tahun 2008 hingga 2009 *Greenpeace* melakukan investigasi lebih lanjut, dengan memberikan gambaran tentang polusi air industri yang disebabkan oleh pembuangan bahan kimia berbahaya di Sungai Mutiara Delta (PRD). perusahaan tekstil telah memilih untuk menggunakan lingkungan dan khususnya saluran air sebagai tempat pembuangan bahan kimia berbahaya industri, tanpa hambatan di banyak tempat dengan peraturan pemerintah yang kurang efektif. Hal ini telah menyebabkan terus-menerus dan berlangsung *build-up* dari bahan kimia berbahaya yang persisten di lingkungan (International, 2009).

Pada tahun 2010 dunia mulai dihebohkan oleh temuan anggota *Greenpeace* yang mengklaim pencemaran paling masif terjadi di Sungai Dong dan Xiaoxi yang terletak di sebelah barat Xintang, salah satu sentra industri jeans terbesar di Tiongkok. Selain air sungai menjadi biru, limbah pabrik jeans juga menyebabkan bau menyengat yang tercium di sekitar sungai. Setelah *Greenpeace* melakukan penelitian ada 17 dari 21 sampel air yang diambil dari sungai-sungai tersebut mengandung logam berat terutama kadmium 128 kali lipat dari batas aman yang ditetapkan pemerintah setempat. Selain itu, pH atau tingkat keasaman air sungai meningkat hingga 12 dari angka normalnya 7 (Health, 2011).

Sehingga pada tahun 2011, *Greenpeace* masuk ke Tiongkok untuk memberikan teguran atas pencemaran lingkungan yang dilaporkan oleh warga sekitar bantaran sungai – sungai di Tiongkok yang kian memburuk keadaannya. *Greenpeace* meluncurkan kampanye “*Detox Campaign on My Fashion*” pada bulan Juli 2011, meminta industri tekstil untuk segera mengambil tanggung jawab untuk kontribusinya terhadap masalah, masa lalu dan sekarang. bahan kimia berbahaya - termasuk 11 kelompok prioritas yang diidentifikasi oleh *Greenpeace*. Diantara 11 kelompok prioritas tersebut adalah *alkilfenol* (APEOs), *phthalates*, *brominated* dan *diklorinasi flame retardants* (BFR, CFR), Azo pewarna, organotin senyawa, bahan kimia *polyfluorinated* (PFC), *chlorobenzenes* (pelarut), *chlorinated*, *chlorophenols*, *parafin* rantai pendek diklorinasi, logam berat seperti kadmium, timbal, merkuri dan kromium (VI) (International, Hidden Consequences The Cost of Industrial Water Pollution on People, Planet and Profit, 2011).

Akhirnya *Greenpeace* mengeluarkan laporan investigasi yang berjudul, '*Dirty Laundry*', yang berisikan bahwa industri tekstil dari perusahaan pakaian swasta yang menyebabkan pencemaran air di Tiongkok memiliki hubungan kerjasama dengan beberapa merek pakaian ternama. Khususnya, merek internasional seperti; Converse, Adidas, H&M, Lacoste, Nike, Puma, merek Cina Li Ning, Meter/ Bonwe, memberitahu *Greenpeace* bahwa perusahaan *brand fashion* tersebut tidak menggunakan proses bahan pakaian yang masuk kedalam kriteria dari *Youngor Group* untuk menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya terhadap produksinya (International, 2011).

Greenpeace pada tahun 2012 mengeluarkan laporan kembali yang berjudul, "*Dirty Laundry: Reloaded*", berisi tentang penggunaan bahan kimia *nonylphenol ethoxylates* (NPE's) dalam perusahaan tekstil ini terus berlanjut sehingga pencemaran lingkungan di Tiongkok masih terus bertambah. Pada tahun 2012, 68% dari perusahaan tekstil tersebut memiliki catatan untuk pembuangan ilegal sementara 25% tidak pernah memenuhi standar lingkungan nasional, menurut data resmi dari Administrasi Kelautan negara bagian Tiongkok (International, 2012).

Kemudian di tahun 2013, *brand fashion* global lainnya yaitu Uniqlo, Benetton, Victoria's Secret, G-Star, Coop and Migros, dan lainnya juga turut menyatakan dukungan terhadap advokasi polusi air di Tiongkok dengan komitmen yang sama. Tetapi belum adanya komitmen yang dikeluarkan oleh perusahaan pakaian internasional tersebut atau hanya wacana (Parameswari, 2016).

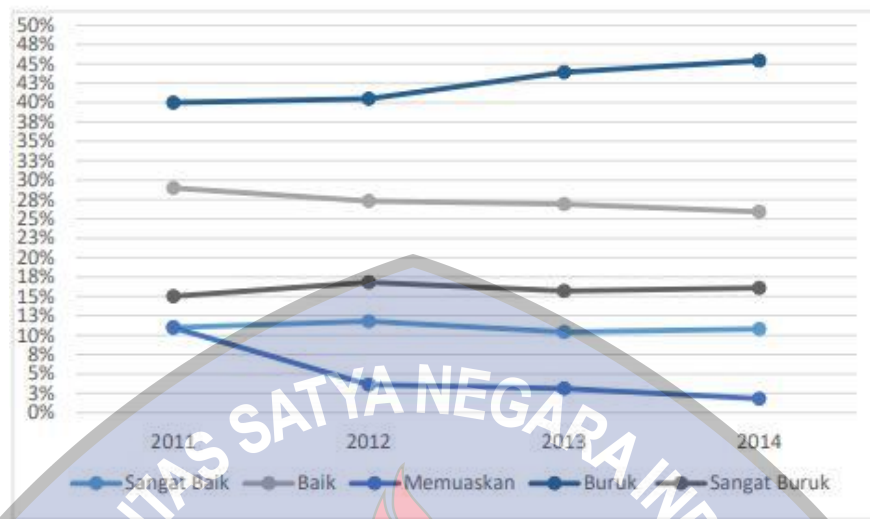
Pada tahun 2014 *Greenpeace* menerbitkan laporan yang berjudul “*A Monstrous Mess: toxic water pollution in China*”, dalam laporan tersebut *Greenpeace* menuliskan di sebelah kota Shishi, pusat produksi pakaian anak-anak, anggota *Greenpeace* menemukan segumpal besar air limbah hitam di permukaan laut; bekas luka hitam besar di atas air itu mudah terlihat melalui citra satelit. Limbah yang dihasilkan oleh *Haiti Engineering Co. Ltd* sebagai pemberi 19 fasilitas pewarnaan tekstil di Shishi menunjukkan bahwa ada 435 titik pembuangan yang mewarnai kota Wubao, menjangkau pantai dan melepaskan 32,2 miliar ton air limbah ke laut setiap tahun (International, 2014).

Greenpeace menguji 85 item pakaian terkena bahan beracun dengan 26 sampel dinyatakan positif NPE dengan konsentrasi tertinggi mencapai 1.800 mg / kg, Lebih dari 90% sampel yang mengandung poliester diuji positif antimon, Dua sampel ditemukan mengandung ftalat dengan konsentrasi di atas 1.000 mg / kg, tertinggi adalah 1.7000 mg / kg, residu zat ini juga dapat ditemukan di antara jutaan produk yang dijual dan diekspor di seluruh Tiongkok dan ke negara-negara di seluruh planet ini dari kota-kota tekstil seperti Shishi dan Zhili. Misalnya, 70 - 80% produk yang diproduksi di Shishi diekspor ke negara-negara di Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara, Asia Tenggara dan Afrika (International, 2014, pp. 1-4).

Menurut laporan yang diterbitkan oleh *Greenpeace* yang berjudul “*A Little Story About a Monstrous Mess II*”, dalam risetnya *greenpeace* mengungkapkan adanya berbagai bahan kimia berbahaya seperti *hormon disruptor nonylphenol*

ethoxylates (NPEs), anilin terklorinasi, dan antimon di dalam air limbah. Limbah pakaian kebanyakan terbuat dari bahan sintetis yang dapat menghabiskan waktu kurang lebih 2000 tahun agar dapat terurai oleh tanah. Meskipun terdapat pakaian serat alami, serat tersebut banyak melalui proses kimiawi hingga menjadikan pakaian yang konsumen pakai tersebut akan berbahaya terhadap lingkungan (International, 2014).

Pada tahun 2015-2017 *Greenpeace* menggerakkan aksi nyatanya kembali lewat kampanye “*Detox Catwalk*” isi dari kampanye tersebut adalah awal pada penelitian *Greenpeace* di tahun 2011, isi dari laporan tersebut adalah meminta Industri tekstil untuk bertanggung jawab dan berkontribusinya terhadap masalah yang anggota *Greenpeace* alami dengan kegagalan dari masalah. Akhirnya di tahun 2016 program kampanye *Greenpeace* memiliki kemajuan yang dimana merek *fashion* H&M, ZARA, MANGO, Uniqlo mulai mengikuti standarisasi dari program *Detox Campaign* yang dibentuk oleh *Greenpeace* (International, 2016). Namun, di tahun ini juga dari kemajuan program *Greenpeace* masih banyak terjadi pencemaran air di sekitar sungai, laut dan danau Tiongkok yang dilakukan oleh perusahaan industri yang belum mengikuti standarisasi program dari kampanye *Greenpeace*. Sehingga, pemerintah Tiongkok pun harus meratifikasi terkait undang – undang perlindungan lingkungan yang ada di Tiongkok.



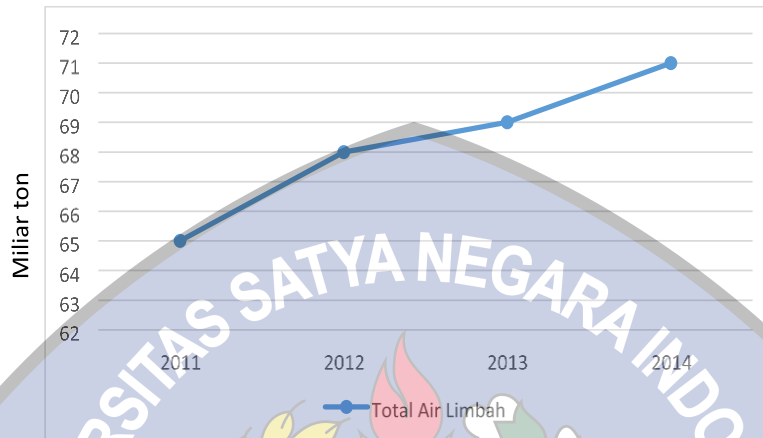
Grafik 1.1

Kualitas Air Tanah di Tiongkok Tahun 2011 – 2014

Sumber : *Qing Lu, Shao Hua Xie, Wen Shan Zhou, Shao Hui Zhang, Ai Lin Liu, Water Pollution and Health Impact in China: A Mini Review, Open Environmental Science, 2008, hal 1-5.*

Data pada grafik 1.1, menggambarkan kualitas air tanah di Tiongkok pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Dari data tersebut, dapat di lihat bahwa kualitas air Tiongkok dominan termasuk ke dalam kategori buruk. Jumlah air dengan kualitas buruk mengalami peningkatan dari 40% menjadi 45.4%. Sementara itu, jumlah air dengan kualitas baik, sangat baik, dan memuaskan mengalami penurunan. Diantara tahun 2011-2014, jumlah air dengan kualitas memuaskan mengalami penurunan dari 11% menjadi 1.80%, kualitas baik mengalami penurunan dari 29% menjadi 25.9%, dan kualitas sangat baik mengalami penurunan dari 11% menjadi 10.8%. Pencemaran air yang terjadi di Tiongkok dapat disebabkan oleh dua jenis, yakni kecelakaan berupa tumpahnya bahan beracun dan akumulasi dari pembuangan polutan., yakni limbah industri merupakan salah satu penyebab

utama dari terjadinya pencemaran air di Tiongkok (Lu, Xie, Zhou, Zhang, & Liu, 2008, pp. 1-5)



Grafik 1.2

Jumlah Air Limbah di Tiongkok Tahun 2011-2014

Sumber : *National Bureau of Statistics of China, 2011 – 2014*

Pada grafik 1.2 menunjukkan jumlah air limbah pada tahun 2011-2014 di Tiongkok. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah air limbah pertahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan Biro Statistik Nasional Republik Rakyat Tiongkok, industri tekstil merupakan salah satu sektor yang menyumbang limbah terbesar terhadap lingkungan (Risk, 2014). Rita Kant menyebutkan bahwa sekitar 17-20% dari pencemaran air yang disebabkan oleh limbah dari industri tekstil dan perawatan finishing yang diberikan pada kain (Kant, 2012, pp. 22-26). Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara tempat produksi tekstil yang menghasilkan dan melakukan aktivitas ekspor pakaian dalam jumlah yang besar.

Di Republik Rakyat Tiongkok, industri tekstil juga merupakan salah satu sektor pencemaran terbesar.

Pada masa ini juga pemerintah Tiongkok melengkapi *resource* dengan membentuk birokrasi perlindungan yang disebut *SEPA (The State Environmental Protection Administration)* adalah birokrasi penting dalam menanggulangi isu lingkungan di Tiongkok. SEPA memiliki fungsi untuk membuat aturan, kebijakan, panduan, dan rencana pembangunan perlindungan lingkungan kepada semua level pemerintahan. SEPA juga melakukan penilaian awal terhadap dampak lingkungan di wilayah-wilayah industri, serta bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengawasan di wilayah-wilayah tertentu (Hennida, 2014, p. 295). Di tahun ini juga, permasalahan lingkungan ini ditangani oleh Anggota Delta Sungai *Pan-Pearl (Members of the Pan-Pearl River Delta/PPRD)*.

PPRD sendiri adalah organisasi lingkungan lokal yang bertujuan untuk bertindak bersama untuk mengendalikan polusi air di Tiongkok. Namun, usaha dari PPRD ini tidak membuahkan hasil yang signifikan karena pejabat lokal seperti kementerian perlindungan lingkungan Tiongkok yang pada tahun 2015 mengganti namanya menjadi MEP (*Ministry of Environmental Protection*) yang begitu lemahnya tanggung jawab atas perlindungan lingkungan di Tiongkok, dengan dana dan staf terbatas (Barak, 2009). Maka dari itu di tahun 2018 peneliti belum mengetahui kelanjutan dalam menyangkut perusahaan tekstil atau pakaian ternama siapa saja yang sudah mengikuti program dari *Detox Campaign* dalam penggunaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya yang banyak ditemukan

dalam limbah dari hasil produksi tekstilnya tersebut. Sehingga, peneliti juga belum mengetahui kebijakan perlindungan lingkungan Tiongkok di tahun 2015 hingga 2018 ini.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada serta adanya sedikit perubahan tersebut Tiongkok percaya diri akan terjaminnya keamanan lingkungan di negaranya karena pemerintah meyakini setiap rencana dalam pembangunan infrastruktur diiringi perlindungan lingkungannya membuahkan hasil yang signifikan. Pada kenyataannya pemerintah Tiongkok belum bisa memprediksi apa yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan domestik maupun luar domestik yang ikut bekerjasama dalam memajukan perekonomian di negaranya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari tahun 1973 sampai 2017 kebijakan perlindungan lingkungan di Tiongkok sudah ada tetapi pemerintah kurang memperhatikan secara detail dalam pelaksanaannya. Namun, dalam implementasinya peneliti banyak menemukan kendala. Kendala yang peneliti rasakan adalah sulitnya mencari informasi di tahun ini terkait permasalahan lingkungan yang ada di negaranya. Namun, peneliti belum menemukan adanya perubahan UU kebijakan Tiongkok terkait perlindungan lingkungan yang signifikan dari segi hukuman yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok itu apa saja kepada perusahaan-perusahaan industri dalam kegiatan pembuangan limbah disekitar sungai, danau maupun laut yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di Tiongkok.

Penelitian ini penting untuk dibahas atau diteliti karena adanya peristiwa pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah di sungai, laut, maupun danau di Tiongkok pada tahun 2004 – 2010 ini terus meningkat yang menyebabkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat Tiongkok, sehingga *Greenpeace* hadir di tahun 2011 hingga 2014 untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran air limbah terhadap sungai, laut maupun danau yang dimana pencemaran air limbah tersebut mulai sedikit berkurang dengan adanya gerakan kampanye yang sudah dilaksanakan oleh *Greenpeace*. Akan tetapi di tahun 2014 pemerintah Tiongkok belum meratifikasi kebijakan undang-undang perlindungan lingkungan yang resmi terkait masalah pencemaran lingkungan di negaranya. Maka itu peneliti ingin melihat efek dari program yang dijalankan *Greenpeace* dalam mengurangi bahan – bahan berbahaya yang dihasilkan oleh para perusahaan pabrik tekstil pakaian ternama di Tiongkok pada tahun 2014 hingga 2018.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti mengangkat satu pertanyaan penelitian yaitu dengan kampanye *Detox Campaign on My Fashion Greenpeace*. Seberapa efektifitas kampanye *Detox My Fashion* yang diuarakan oleh *Greenpeace* dalam menangani kasus pencemaran lingkungan yang ada di Tiongkok pada tahun 2014 hingga 2018?

1.3 Batasan Penelitian

Peneliti hanya membahas efektifitas program *Detox Campaign on My Fashion Greenpeace* di Tiongkok melalui pendekatan kepada perusahaan dan masyarakat internasional misalnya, advokasi, pendidikan dan juga pelatihan yang diberikan oleh *Greenpeace* kepada masyarakat Tiongkok. Dalam menyangkut terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Tiongkok dari tahun 2014 hingga 2018. Penulis memilih tahun 2014 karena *Greenpeace* meluncurkan kampanye *Detox My Fashion* dimulai pada tahun 2014 dan laporan terakhir yang dikeluarkan oleh *Greenpeace* untuk Tiongkok diterbitkan pada tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melihat efektifitas dari program *Greenpeace* terhadap gerakan kampanye lingkungan yang diciptakan dengan nama *Detox My Fashion*, dari gerakan tersebut *Greenpeace* meminta perusahaan-perusahaan *fashion* ternama untuk menghentikan pencemaran lingkungan air dengan bahan kimia berbahaya dari produksi pakaiannya di Tiongkok.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dalam dua, bagian yaitu secara Teoritis dan Praktis. yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan masukan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional, serta dapat bermanfaat dengan memberikan gambaran mengenai bahan kimia *PFC*, *NPEs* yang terdapat pada pakaian yang ada pada merek-merek pakaian ternama yang berada di Tiongkok. Kemudian, sebagai bahan informasi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang sama dengan penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Khususnya bagi peneliti sendiri adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca untuk mengetahui seberapa berbahayanya pencemaran lingkungan atau pencemaran pada air bersih yang dihasilkan oleh industri tekstil di Tiongkok. Peneliti berharap dengan diadakannya penelitian mengenai gerakan *Detox Campaign on My Fashion* yang diciptakan oleh *Greenpeace* dalam kampanyenya serta penanganan yang komprehensif dalam pencemaran air tersebut dan dapat memberikan gambaran, bagaimana cara masyarakat Tiongkok serta pemerintah Tiongkok agar lebih bijak lagi dalam mengatasi serta meningkatkan mutu kualitas air agar tidak tercemar efek dari warna tekstil yang dihasilkannya itu serta jasa pembuatan tekstil di Tiongkok ini agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang dapat

merubah pakaian tekstil menjadi pakaian yang memenuhi standar kriteria yang ramah lingkungan, serta bisa menjadi contoh bagi negara-negara anggota yang melakukan kesepatan kerjasama tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab,yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengapa mengambil permasalahan ini dan di nilai layak untuk diangkat sebagai masalah yang perlu di teliti dan ditelusuri sebagai sebuah karya ilmiah. Dimana dalam bab ini terkandung unsur – unsur yang menjadi latar belakang masalah yang akan dibahas pada bab lainnya, juga terdapat pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya terdapat manfaat teoritis dan praktis yang ingin dicapai oleh peneliti dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan referensi karya ilmiah yang memiliki landasan konseptual yang merupakan penjelasan dari konsep advokasi, gerakan sosial, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), memiliki alur pemikiran yang menjelaskan keterkaitan teori, konsep dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi metodologi deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil analisa peneliti dari data yang menjadi temuan peneliti. Bab ini menjelaskan terkait sejauh manakah efektifitas *Greenpeace* dalam kampanye *detox*-nya untuk mengurangi pencemaran air serta krisis lingkungan yang diakibatkan oleh limbah-limbah industri pakaian ternama di Tiongkok. Dan alasan mengapa pelaku bisnis internasional dibidang usaha *fashion* ternama saat ini di Tiongkok ada yang belum mengikuti standar kriteria bahan pakaian yang ramah lingkungan dikeluarkan oleh *Greenpeace* dalam kampanyenya untuk mengurangi limbah dari pakaian sehari-hari.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan uraian secara singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah yang dibantu oleh pembahasan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, terutama terkait efektifitas *Greenpeace* dalam kampanyenya untuk mengurangi pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah-limbah industri pakaian merek ternama di Tiongkok.